

# 2025



Nomor : 37.13/RIS/XI/2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Senin, 17 November 2025

- Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 17 November 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 15.00 WIB

### Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro	Hadir

### Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

---

---

### **Pembawa Acara**

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

### RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SENIN, TANGGAL 17, BULAN NOVEMBER, TAHUN 2025

**DENGAN ACARA :**

1. **Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;**
2. **Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 26 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 17 November 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,  
Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan untuk menyampaikannya.

----- **JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA** -----

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,  
Agenda selanjutnya adalah Penutupan Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 18 November sampai dengan 21 November 2025.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, anggota DPRD Kota Yogyakarta akan melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini saya atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta secara resmi menutup Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

**Ketok Palu 1 (satu) kali. (X)**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,  
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 November 2025.

**PIMPINAN RAPAT :**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,  
Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**



Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

**PEMBAWA ACARA :**

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

**----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----**

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

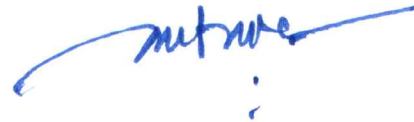
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.  
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Senin, 17 November 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 15.00 WIB

Pimpinan Rapat :  
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir  
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir  
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

**Peserta**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

**Hasil Rapat :**

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 26 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta.
4. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat  
Wakil Ketua,

RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 13 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1826  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-  
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/1817, tanggal 12 November 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 17 November 2025.  
Pukul : 09.00 WIB – sampai selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.  
Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

**Diralat waktunya menjadi :**

Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.  
Sedangkan Hari, Tanggal, Acara, dan Pakaian tetap

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN







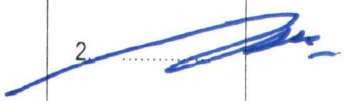



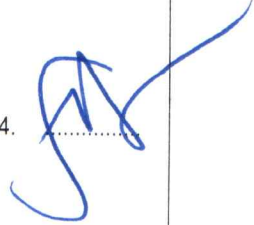
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦗꦏꦠꦫꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
 Laman \_www.dprd-jogjakota.go.id \_Pos-el dprd@jogjakota.go.id

**DAFTAR HADIR**

- Hari : Senin  
 Tanggal : 17 November 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna  
 Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  
 2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.  
 a.

No	Nama		Tanda Tangan		Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDoyo, Sp.OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	1. ....		
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA		2. 	
3.		KODIM 0734	3. 		
4.		POLRESTA		4. 	
5.		PENGADILAN NEGERI	5. ....		
6.		KEJAKSAAN NEGERI		6. ....	







PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦺꦴꦠꦏꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165  
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
 Laman [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) Pos-el [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
 Tanggal : 17 November 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna  
 Acara : 1. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;  
 2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jeh Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Alpi Hasbiukati		Dinas Kesehatan	2.	
3.	Umi A		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Suprihatin		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	Hery		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Gisem Adipra		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Zulf Amin		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	H R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jalud		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Kisbiyanta		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	Sukir		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	LHM		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Suciati Suci		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	Ayu ARIFA		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Wahyu Seti		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tri Setya A		Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan)	16.	
17.	Beto N		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	BUDI SANTOSA		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Syuhuzana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	





**WALI KOTA YOGYAKARTA**

**JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA**

**ATAS**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



---

**JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna;

Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,

Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta,

Rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melanjutkan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang sudah dihantarkan pada tanggal 12 September 2025.

## **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Sebelum menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Kami menghargai segala masukan, kritik, dan saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD, yang tentunya merupakan upaya konstruktif dalam mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik. Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut, perkenankan kami menyampaikan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

### **1. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat dengan legislatif terkait pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan PAD dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi daerah. Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai langkah strategis dan terukur, tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perbaikan sistem administrasi, pengawasan, dan pelayanan perlu terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, sosialisasi yang lebih luas, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat manajemen sumber daya manusia serta inovasi kebijakan fiskal yang responsif agar proses pemungutan menjadi lebih sederhana, efisien, dan mendorong kepatuhan pajak. Upaya ini dilakukan secara

berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal, efisien, dan berkeadilan.

Penguatan sistem berbasis data dan digitalisasi menjadi kunci modernisasi pengelolaan pajak dan retribusi. Saat ini telah mulai dilaksanakan pengembangan sistem yang terintegrasi, penerapan pembayaran digital (QRIS) termasuk pada retribusi parkir, serta pengawasan *real-time* melalui *tapping box* dan e-SPTPD. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus menegakkan aturan dengan pendekatan edukatif dan persuasif, disertai penindakan bagi pelanggaran berulang.

Dalam hal diversifikasi PAD, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mengurangi ketergantungan pada pajak antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan kemandirian fiskal dan penguatan ekonomi lokal.

Upaya penguatan BUMD agar dapat mandiri secara finansial dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan kinerja bisnis dan efisiensi operasional, membuka unit usaha baru yang sesuai dengan potensi daerah, meningkatkan kompetensi SDM dan manajemen, digitalisasi dan inovasi serta membangun sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat. Jika BUMD sudah mandiri dan tidak bergantung pada bantuan modal atau subsidi daerah, maka dapat fokus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk memperoleh laba sehingga laba meningkat dan bisa menyetorkan dividen yang lebih besar untuk daerah.

## **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Kami sepakat bahwa penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap diperlukan agar BUMD dapat memberikan kontribusi lebih optimal pada pendapatan daerah di masa mendatang. Untuk APBD tahun 2026 Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat melakukan penyertaan modal karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan tahapan penyertaan modal pada BUMD ditahun 2021 kepada Perumda PDAM Tirtamarta sebesar RP 9 milyar, tahun 2023 kepada Bank Jogja sebesar Rp 35 milyar dan kepada PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebesar Rp6,7 milyar. Di tahun 2025 ini dengan selesainya proses penyusunan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda) mulai tahun 2027.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan PAD, akan dilakukan inventarisasi barang-barang milik daerah yang berada pada perangkat daerah yang sudah tidak mendukung pelaksanaan tupoksi agar dapat diserahkan kepada Pengelola Barang sehingga dapat dioptimalkan melalui skema sewa, Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna, kerjasama pemanfaatan, atau dengan skema Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Sedangkan untuk barang milik daerah yang masih digunakan oleh perangkat dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya maka skema yang diberlakukan adalah dengan retribusi atas barang milik daerah. Kami sepakat dengan legislatif bahwa pengawasan manajemen pengelolaan aset merupakan salah satu unsur yang sangat mendukung dalam proses tercapainya optimalisasi aset yang

efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Kedepannya, aspek pengawasan manajemen pengelolaan aset akan terus kami tingkatkan.

## **2. BELANJA DAERAH**

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengoptimalkan belanja daerah guna mendukung Tema Pembangunan "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta". Program prioritas dan inovasi untuk membangkitkan semangat dan optimisme masyarakat seperti Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana serta Penumbuhan Wirausaha telah dicanangkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat tidak mampu atau secara akademik tidak menuntaskan pendidikannya ke jenjang ideal sehingga mereka dapat mempunyai modal skill atau kemampuan untuk menjangkau lapangan pekerjaan yang layak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Realisasi belanja daerah dioptimalkan untuk mendanai urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum serta pemberian jaminan sosial bagi masyarakat rentan.

Penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mengakibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan penyesuaian belanja daerah pada seluruh perangkat daerah, tidak terkecuali pada kemantren. Meskipun demikian, belanja yang dirasionalisasi adalah belanja-belanja kegiatan yang tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Yogyakarta tetap dianggarkan melalui APBD. Pemanfaatan SILPA diprioritaskan untuk kegiatan

yang bersifat wajib mengikat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Penyesuaian anggaran pada seluruh Perangkat Daerah tidak menyasar pada pengurangan atau pemutusan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* maupun staf non ASN lainnya. Tetapi lebih kepada belanja pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dipastikan tidak berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan usulan legislatif mengenai penataan pengadaan barang dan jasa, kami sepakat untuk dilaksanakan guna memastikan penyerapan yang sehat dan eksekusi yang berkualitas. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendampingan pengisian rencana umum pengadaan dalam aplikasi SIRUP kepada masing-masing PPKom di SKPD. Dalam pendampingan juga disampaikan untuk menyusun tata kala secara proporsional, sehingga cukup waktu untuk pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.

### **3. PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menjadi komitmen kami untuk memajukan pendidikan dengan berbagai kebijakan disertai dengan komitmen penganggaran yang mencukupi dalam rangka mempertahankan citra Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kota pelajar di tanah air.

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk terus melakukan peningkatan akses pendidikan melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan perguruan tinggi, layanan yang dilaksanakan antara lain : pemberian

jaminan pendidikan daerah bagi keluarga penerima Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang terdata dalam kategori keluarga miskin. Dalam konteks ini kami berupaya untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat terkait penentuan data base dari pusat dengan kondisi riil di lapangan. Bagi warga kota yang masuk dalam Desil 1 sampai 5 namun bukan keluarga penerima KSJPS dapat diberikan bantuan tunggakan pendidikan. Untuk meningkatkan cakupan layanan bantuan tunggakan pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya antara lain: membuka loket layanan konsultasi kesulitan pendanaan pendidikan di UPT JPD, menyediakan *hot line* konsultasi kesulitan pendanaan pendidikan, melaksanakan sosialisasi di setiap kelurahan dan juga memasang stiker dan leaflet di wilayah. Pada tahun 2026 Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program baru yaitu 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana dengan target 250 orang, berupa bantuan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal).

Bantuan Operasional Sekolah Daerah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta baik swasta maupun negeri. Sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah, karena menurunnya dana transfer ke daerah maka dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diperlukan strategi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu mengurangi besaran BOSDA Negeri di satuan pendidikan jenjang SMP yang besarnya semula Rp1.500.000,- menjadi Rp1.250.000,-. sedangkan untuk jenjang TK dan SD Negeri tidak mengalami perubahan besaran. Besaran tersebut masih diatas besaran BOS Pusat. Kami akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan seperti perjalanan dinas dan kegiatan ceremonial. Untuk sekolah swasta yang kemampuan pembiayaannya rendah tidak mengalami pengurangan bosda swasta, namun untuk sekolah swasta

yang kemampuan pembiayaannya tinggi, besaran bosda yang diberikan perlu disesuaikan. Meskipun besaran BOSDA Swasta untuk sekolah swasta yang kemampuan pembiayaannya tinggi dilakukan penyesuaian tetapi untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan tetap terpenuhi atau tidak mengalami penurunan anggaran dalam bentuk insentif baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah swasta.

### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Berkaitan dengan putusan MK yang menggratiskan pendidikan dasar (semua biaya ditanggung pemerintah daerah) dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut aturan dari pemerintah pusat. Kebijakan terkait pemberian BOSDA Swasta dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan pelayanan yang berkeadilan. Adapun terkait dengan pembiayaan bagi siswa non warga Kota Yogyakarta, kami akan mendorong kerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar berkaitan dengan skema biaya pendidikan sehingga semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diwujudkan.

## **4. KESEHATAN**

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait dengan kesehatan. Keberhasilan Kota Yogyakarta dalam mencapai *Universal Health Coverage* tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah aktif dalam menyesuaikan kebijakan mengikuti dinamika kebijakan dan regulasi terkait JKN,

serta koordinasi lintas sektor dalam pendataan penduduk sehingga setiap penduduk Kota Yogyakarta mendapat jaminan kesehatan. Dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage lebih dari 99%, upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Dinas Kesehatan melakukan proses verifikasi dan validasi data kepesertaan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengajuan kepesertaan PBI JKN (APBN),
3. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan semua pekerja penerima upah beserta keluarganya sudah tercover BPJS Kesehatan segmen PPU.

## **5. KEMISKINAN**

Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Dalam aspek ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melanjutkan pelaksanaan program yang mendukung perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, antara lain melalui:

- a. Padat Karya Infrastruktur,
- b. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM),
- c. Pelatihan berbasis kompetensi,
- d. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,
- e. Fasilitasi penempatan tenaga kerja.
- f. Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja untuk mendorong wirausaha baru dan pengembangan UMKM.

Selain itu, dalam aspek sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memperkuat program jaring pengaman sosial melalui penyaluran bantuan sosial berbasis data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), monitoring dan evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat agar pelaksanaan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## **6. USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian masyarakat. Tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, namun juga sebagai penopang ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kota Yogyakarta sekaligus untuk mendukung program prioritas nasional, sinkronisasi Program MBG dengan Pemberdayaan Kelompok Tani/UMKM Program MBG di Kota Yogyakarta sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak Februari 2025 dengan peran aktif Dinas Kesehatan yang menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat, terutama siswa sekolah. Program ini memberi perhatian pada distribusi makanan bergizi yang aman, melibatkan pelatihan keamanan pangan bagi pelaku usaha makanan dan catering yang berperan dalam MBG. Ini dapat disinergikan dengan program pemberdayaan kelompok tani/UMKM lokal sebagai sumber bahan pangan berkualitas dan bergizi untuk MBG, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran UMKM di sektor pangan.

Peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam Ekonomi Lokal Yogyakarta KMP merupakan program strategis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025 sebagai pilar ekonomi kerakyatan

berbasis gotong royong dan sektor riil. Koperasi ini mendukung ketahanan ekonomi lokal melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sembako dan layanan finansial, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan pelaku UMKM dan komunitas tani. KMP dapat menjadi mitra bagi UMKM dan kelompok tani dalam rantai pasok pangan bergizi untuk program MBG, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekosistem Ekonomi Sirkular di Kota Yogyakarta juga menginisiasi pengelolaan ekonomi sirkular melalui program pemberdayaan masyarakat lokal, seperti pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga bernilai ekonomis dan optimalisasi bank sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ini dapat sinkron dengan pemberdayaan kelompok tani dan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi sirkular, di mana keberlanjutan produksi pangan bergizi dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi perhatian utama. Sinergi ini berpotensi mendukung MBG secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas lokal dan pertukaran sumber daya maupun produk. Dengan demikian, sinkronisasi program MBG dan KMP dengan program daerah pemberdayaan kelompok tani/UMKM di Kota Yogyakarta bisa diwujudkan melalui integrasi rantai pasok pangan bergizi lokal yang difasilitasi koperasi, sekaligus peningkatan kapasitas dan pelatihan keamanan pangan serta pengelolaan ekonomi sirkular yang merangkul seluruh ekosistem ekonomi lokal tersebut.

## **7. PARIWISATA**

Pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta lebih diarahkan sebagai penyedia jasa layanan yang menghubungkan pariwisata di kabupaten sekitar Kota Yogyakarta. Sedangkan pengembangan aneka festival

dan event yang dilaksanakan pada malam hari bertujuan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.

Kegiatan event promosi daerah diselenggarakan secara selektif dengan melibatkan UMKM untuk memastikan bahwa keikutsertaan perangkat daerah dalam pelaksanaan event promosi dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan UMKM.

Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan kegiatan promosi pariwisata tahun 2026 yang pelaksanaannya dibantu oleh Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). Kegiatan promosi dilaksanakan dalam bentuk daring dan luring. Adapun penjelasan dari kegiatan tersebut:

#### 1. Via Daring

Kegiatan promosi pariwisata secara daring dilakukan melalui sosial media instagram, tiktok, youtube dan facebook. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan potensi pariwisata Kota Yogyakarta kepada wisatawan nusantara dan mancanegara melalui konten digital yang menarik dalam bentuk video dan foto tentang destinasi, event, industri pariwisata serta kuliner, kriya, dan fashion (produk UMKM). Format promosi melalui media digital saat ini dipercaya menjadi sarana promosi yang paling efektif dan mengena, sehingga dapat menarik wisatawan dalam jumlah yang besar untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

#### 2. Via Luring

Kegiatan promosi pariwisata secara luring dilakukan dengan cara mendatangi:

- a. daerah potensial kunjungan wisatawan
- b. daerah yang telah mendatangkan jumlah kunjungan tertinggi (berdasar data)

Adapun kegiatan via luring yang dilakukan antara lain:

a. Jogja Day

Merupakan penyelenggaraan *direct promotion* ke beberapa kota potensial di luar DIY yang menjadi target untuk mendatangkan wisatawan. Bentuk kegiatannya berupa *table top bussiness to bussiness* yang melibatkan usaha jasa pariwisata Kota Yogyakarta sebagai *seller*, serta mengundang *buyer* dari travel agent di kota tersebut. Selain itu terdapat kegiatan lain dalam bentuk travel dialog yang mengundang perwakilan sekolah di tingkat SMA dan SMP sebagai target wisatawan grup untuk diberi update informasi mengenai pariwisata di Kota Yogyakarta serta kegiatan dalam bentuk travel fair yang membawa produk UMKM dari kampung wisata serta usaha jasa pariwisata lainnya untuk dipromosikan.

b. Jogja Vaganza

Merupakan penyelenggaraan kegiatan *table top bussiness to bussiness* dan *travel dialog* yang melibatkan usaha jasa pariwisata Kota Yogyakarta sebagai *seller* dan mengundang travel agent dari seluruh Indonesia sebagai *buyer*. Kegiatan promosi lain kepada *buyer* salah satunya adalah *famtrip*, yang membawa mereka secara langsung merasakan pengalaman berwisata di Kota Yogyakarta dengan destinasi salah satunya ke pusat oleh-oleh, kampung wisata dan *experience* pembuatan batik, perak dsb sebagai bentuk promosi produk UMKM Kota Yogyakarta, dengan tujuan agar mereka dapat memasukkan potensi-potensi wisata tersebut di paket wisata mereka.

Berkaitan dengan event/agenda Apeksi, Apeksi menyediakan platform bagi UKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk kota-kota lain di Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM memfasilitasi pameran UMKM pada agenda tersebut. Hal ini menjadi sarana promosi yang efektif untuk menarik investasi dan

meningkatkan pariwisata daerah, wadah kolaborasi dan berbagi pengalaman dalam memajukan daerah. Selain itu, melalui kegiatan tersebut UMKM dapat membangun jaringan dengan pelaku bisnis lain, pemerintah daerah, dan investor melalui kegiatan Apeksi. Apeksi juga seringkali mengadakan pelatihan dan dapat meningkatkan kapasitas UKM dalam berbagai aspek, seperti produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan.

## **8. PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

Pemerintah Kota Yogyakarta memahami bahwa perparkiran merupakan salah satu isu strategis yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta berpengaruh terhadap pariwisata di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat upaya pencegahan praktik parkir liar melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah koordinasi lintas sektor dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan unsur eksekutif, yudikatif, dan kepolisian, guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan terintegrasi. Dalam penegakan parkir liar secara terpadu dilakukan kegiatan "Patroli Istimewa" yang melibatkan jajaran Polresta Yogyakarta, dengan fokus utama pada kawasan rawan pelanggaran seperti pusat kota, area wisata, dan ruas jalan protokol. Patroli Istimewa ini bertujuan untuk menindak praktik parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas, serta berpotensi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Melalui kegiatan ini, di harapkan dapat mewujudkan sistem perparkiran yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku parkir liar.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan penataan dan pengawasan lokasi parkir resmi, penertiban juru parkir tidak berizin, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya parkir di tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan daerah. Masyarakat diimbau untuk memarkir kendaraan hanya di lokasi resmi yang telah ditetapkan guna mendukung terwujudnya Yogyakarta yang tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya praktik parkir liar, mengurangi kemacetan, serta mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

## **9. PENGELOLAAN SAMPAH**

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan sampah perkotaan melalui kebijakan holistik dan terintegrasi, dari hulu sampai hilir. Upaya peningkatan program pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga dilakukan dengan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Setelah sampah telah terpilah menurut jenisnya, maka:

- a. untuk jenis sampah anorganik akan dikelola di bank sampah unit,
- b. untuk jenis sampah organik rumah tangga dikelola melalui pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga atau komunal, dengan memanfaatkan biopori, losida, biopori jumbo, ember tumpuk, maggot, dan lain sebagainya,
- c. sampah organik terpilah juga dapat diselesaikan dengan penyaluran kepada mitra pakan ternak melalui transporter (program emberisasi),

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya:

- a. mengeluarkan himbauan untuk mengurangi penggunaan wadah sekali pakai dalam pertemuan-pertemuan warga, membawa kantong belanja, sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4/3479 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai,
- b. pemilahan sampah rumah tangga berukuran besar (seperti kasur, sampah perindangan) untuk selanjutnya diangkut oleh Tim TRC MAS JOS DLH,
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah khususnya pada pemilahan sampah dan pengolahan sampah kepada masyarakat di wilayah,
- d. Membangun laboratorium pengolahan sampah organik terpadu sebagai pusat pengolahan sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga dan lingkungan sekitar menjadi pupuk siap pakai.

Upaya-upaya di atas dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS/Depo, dan juga untuk menekan biaya operasional.

### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Berkaitan dengan defisit pembiayaan sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengkaji kembali penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Penyesuaian tarif ini digunakan sebagai bahan usulan perubahan tarif pada Raperda Perubahan Perda 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penyesuaian tarif retribusi disesuaikan dengan tarif progresif berdasarkan jumlah volume/berat sampah yang dibuang pada fasilitas pengelolaan sampah Kota Yogyakarta (TPS/Depo). Hal ini

sesuai asas keadilan pengelolaan sampah dan sebagai reward untuk masyarakat yang sudah melakukan pengurangan sampah dan pemilahan sampah sejak dari sumber. Bagi masyarakat yang sudah melakukan pengurangan sampah di sumber dan hanya sampah residu yang dibawa ke Depo maka retribusi yang dibayarkan akan lebih rendah dibandingkan masyarakat yang belum melakukan pengurangan dan pemilahan.

Tarif retribusi berdasarkan volume/berat sampah juga diharapkan dapat mendorong masyarakat dapat melakukan pengurangan sampah dengan pengolahan sampah di sumber dan melakukan pemilahan sampah sehingga sampah yang di bawa ke Depo hanya jenis sampah residu.

Selain itu, optimalisasi pendapatan retribusi kebersihan pelayanan persampahan menjadi syarat dalam Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yaitu syarat nomor 4 yang berbunyi "Pemda berkomitmen melakukan penyusunan dan penyelenggaraan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan".

## **10. INVESTASI**

Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan legislatif terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Sebagai upaya pemerataan jangkauan investasi agar iklim usaha yang dibangun semakin kondusif, maka pada tahun 2026 upaya peningkatan investasi akan dilakukan melalui penyediaan data serta sarana penunjang investasi yang dicapai melalui:

- a. Pembangunan sistem "katalog data" sebagai upaya penyediaan data investasi dan perizinan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- b. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) Kawasan Selatan.
- c. Penyusunan kajian Peta Potensi Ekonomi Kreatif.
- d. Penyusunan kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
- e. Pelaksanaan *bussines matching* sebagai upaya promosi dan publikasi potensi investasi dan menjaring kepeminatan investasi.
- f. Pelaksanaan jogja festival sebagai upaya fasilitasi ekonomi kreatif.
- g. Pameran investasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepeminatan investasi dari luar Jawa.
- h. Pelaksanaan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagai upaya fasilitasi konsultasi dan penyelesaian permasalahan serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis LKPM sebagai upaya mendorong capaian realisasi investasi di Kota Yogyakarta

Berbagai upaya diatas diharapkan mampu menarik investor dan meningkatkan investasi di Kota Yogyakarta sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **11. PEMUKIMAN**

Kami menyadari bahwa penataan pemukiman merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan nyaman untuk dihuni. Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat dengan usulan legislatif terkait percepatan penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan konsep Mundur, Mungah dan

Madhep Kali (M3K), perbaikan infrastruktur seperti sanitasi (IPAL), dan penataan fisik kawasan (konsolidasi lahan, pembangunan rumah deret, dan Rusunawa) sepanjang DAS Code, Winongo dan Gajahwong. Dalam rangka mempercepat penataan kawasan kumuh, selain koordinasi dengan pemerintah pusat maupun DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengeprasan rumah maupun pembangunan rumah pada lokasi konsolidasi lahan di lokasi-lokasi yang sudah ada DED dan kesepakatan dengan warga. Hal ini dilaksanakan utk memberikan pemahaman masyarakat bahwa penataan ini merupakan komitmen pemerintah dengan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran. Pekerjaan penataan dengan pengeprasan maupun pembangunan rumah dibiayai dengan APBD, sedangkan untuk prasarana, sarana dan utilitas seperti jalan lingkungan, jaringan jalan, jaringan drainase dan limbah, lampu penerangan jalan umum, dan pagar diusulkan ke DIY maupun pemerintah pusat.

## **12. SMART CITY**

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari bahwa dalam era digitalisasi ini, penguatan sektor digital menjadi suatu kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penguatan *Smart City* menjadi penting untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan layanan publik, peningkatan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan, optimalisasi PAD serta efisiensi belanja daerah. Oleh karena itu, penguatan *Smart City* melalui *Jogja Smart Services* akan terus dilaksanakan.

Adapun terkait saran bahwa menurunnya jumlah kunjungan fisik ke Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tolak ukur keberhasilan digitalisasi, dapat kami sampaikan bahwa jumlah kunjungan fisik di MPP tidak mencerminkan jumlah izin terbit melalui aplikasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui JSS (*Jogja Smart Service*). Hal ini dikarenakan pengunjung MPP selama ini tidak hanya pemohon izin tetapi juga pengunjung (masyarakat) yang mengakses dan memanfaatkan layanan lain terkait perbankan, jamkesda, layanan bantuan hukum, pajak, perpustakaan, samsat, *drive thru*, *coffe shop* dan fasilitas lain yang tidak tersedia dalam aplikasi JSS dan hanya dapat diakses secara luring di MPP.

### **13. PENGAWASAN DAN SINERGI LINTAS SEKTOR**

Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat dengan masukan legislatif bahwa mekanisme pengawasan program terintegrasi dan terpadu penting untuk dilaksanakan guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan menciptakan dampak holistik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan penekanan strategis Wali Kota. Pengawasan program lintas sektor sudah mulai dilakukan tahun 2025 melalui audit kinerja lintas sektoral atas program Penanganan Kemiskinan dengan auditan pada beberapa Perangkat Daerah yang mengampu program tersebut. Kedepan, pengawasan program lintas sektor akan terus dilakukan setiap tahun menyesuaikan program prioritas daerah.

**Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Akhirnya, kami telah berusaha menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, namun jika dalam penyampaian jawaban tersebut masih ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya apabila masih diperlukan penjelasan lebih detil dapat dibahas dalam forum koordinasi antara Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan antara Komisi dengan Perangkat Daerah mitra kerjanya.

Kami menyambut baik setiap saran dan masukan yang diberikan, dan kami akan terus berupaya untuk mewujudkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Yogyakarta. Harapan kami Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera diterima dan disetujui, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mengabdikan dan berkarya untuk masyarakat Kota Yogyakarta.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,  
  
HASTO WARDOYO



**2025**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**



**37**